



Transformasi Visual Lambang-Lambang Partai Politik Islam (1955 – 2004)

Reiza D. Dienaputra

Program Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain ITB

Abstract. The existence of Islamic political parties in the field of Indonesian politics has a very long history. The Islamic political parties had actually been found before the independence. Their quantitatively significant development, however, takes place after the era of independence. Throughout the development, there have been many researches on the existence of Indonesian political parties. Among those researches, however, it seems that there has never been a research carried out by employing visual sources such as symbols of political parties. These symbols are often neglected. They are as if something which cannot be explored and tend to be merely a complement for a political party. In fact without any symbols, it is impossible for a political party to follow election. Therefore, a symbol plays a very important role since it is not only to show the identity of a political party but also to fulfill the provisions of legislation. For the above reasons I am interested in carrying out this research. In relation to that, the research employs both political and cultural approaches in order to produce interesting findings about political parties' symbols. Based on the study upon the symbols of Islamic political parties participating in 1955 – 2004 elections, it is found that the visualization of the symbols undergoes an incredibly dynamic development in both element and sense of form. There are several factors which cause the coming out of visual dynamics on political parties' symbols such as the experience of national history, cultures built up in the society, and the improvement of design technology. The dynamics of the element of form shows a visual reality that the moon and the star, which are usually regarded as the representation of Islamic political parties, are not always used by Islamic political parties and they are not only used by them as their symbols as well. Furthermore, the dynamics of the sense of form also show interesting finding that the star as the element of form does not constantly produce the same sense of form.

Keywords: *political party; symbol; visual; visualization.*

1 Pendahuluan

Partai politik sebagai salah satu unsur dari infrastruktur politik, dapat dikatakan memiliki akar sejarah yang relatif panjang. Ia telah menjadi milik bangsa Indonesia tidak lama setelah bangsa ini menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Segera setelah pemerintah mengeluarkan sebuah

Maklumat pada tanggal 3 November 1945,¹ keberadaan partai politik tumbuh pesat secara kuantitatif. Bangsa yang baru saja merdeka ini pun langsung mengakrabi keberadaan organisasi baru ini.

Seiring dengan keragaman ideologi yang dimiliki bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan tercapai, partai-partai politik yang lahir di era kemerdekaan pun kaya dengan keberagaman ideologi. Namun, bila kemudian dilakukan pengelompokan, setidaknya ada tiga ideologi besar yang diusung partai-partai politik di awal kemerdekaan. Ketiga ideologi tersebut adalah, Nasionalis, Agama, dan Komunis. Tiga ideologi besar ini tampak dominan saat berlangsungnya pemilu pertama pada tahun 1955.

Berbeda dengan partai-partai politik yang mengusung ideologi nasionalis dan agama, perjalanan partai politik yang mengusung ideologi komunis tidaklah berusia panjang. Krisis politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1960-an, menjadi akhir perjalanan partai-partai politik yang mengusung ideologi komunis. Dengan demikian, sejak pertengahan tahun 1960-an, praktis hanya ada dua ideologi besar yang diusung partai-partai politik di Indonesia, yakni nasionalis dan agama. Dari sekian banyak partai politik yang mengusung agama sebagai ideologinya, sebagian besar di antaranya mengusung Islam atau agama Islam sebagai ideologi partai. Partai-partai inilah yang kemudian dikenal sebagai partai-partai Islam.

Kajian terhadap eksistensi partai-partai politik Islam, tentu sudah banyak dilakukan para ahli, namun masih sedikit di antara kajian tersebut yang mendekatinya melalui pemanfaatan sumber visual. Kajian terhadap partai-partai Islam melalui pemanfaatan sumber visual ini dilakukan dengan mengamati lambang-lambang yang dimiliki partai-partai politik Islam. Melalui pembacaan terhadap lambang-lambang partai politik Islam diharapkan dapat diperoleh temuan menarik tentang eksistensi partai-partai politik Islam dalam ranah politik Indonesia. Namun demikian, mengingat banyaknya partai-partai politik Islam yang pernah hadir dalam kancah politik Indonesia, maka partai politik Islam yang menjadi fokus kajian tulisan ini adalah partai-partai politik Islam yang menjadi peserta pemilihan umum, mulai Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004.

¹ Maklumat 3 November 1945 yang berisi anjuran pendirian partai-partai politik sering diidentikan dengan Maklumat No. X. Padahal, Maklumat No. X merupakan sebuah maklumat yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945 yang isinya berupa perubahan status KNIP dari sekedar Pembantu Presiden menjadi badan yang mempunyai kekuasaan legislatif. Menurut Daniel Dhakidae [1], Maklumat No. X ini sering salah dibaca sebagai maklumat eks.

2 Metodologi Penelitian

Berpijak dari apa yang telah diuraikan di atas, metode sejarah menjadi pilihan utama yang digunakan untuk melakukan rekonstruksi kesejarahan tentang Dinamika visual Lambang-lambang Partai Politik Islam (1955 -2004). Dalam metode sejarah, ada empat tahapan kerja, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan pengumpulan sumber. Dalam kaitan ini secara baku sumber-sumber sejarah (*historical sources*) dikategorikan atas tiga jenis sumber, yakni, sumber tulisan (*written*), sumber benda (*material*), dan sumber lisan (*immaterial*). Namun, Garraghan [2], secara implisit mengatakan bahwa di samping *oral sources* dan *written sources*, klasifikasi lain yang merupakan sumber sejarah resmi adalah *picture (pictorial)* atau *figure (figured)*.

Untuk menjadikan karya penelitian tidak deskriptif semata, maka penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan politik dan pendekatan kebudayaan. Pendekatan politik di antaranya digunakan untuk memahami partai politik serta sistem politik yang mempengaruhi sistem kepartaian. Pendekatan kebudayaan digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap visualisasi lambang partai politik serta untuk mengetahui makna visual lambang partai-partai politik.

3 Visualisasi Lambang Partai Politik Islam

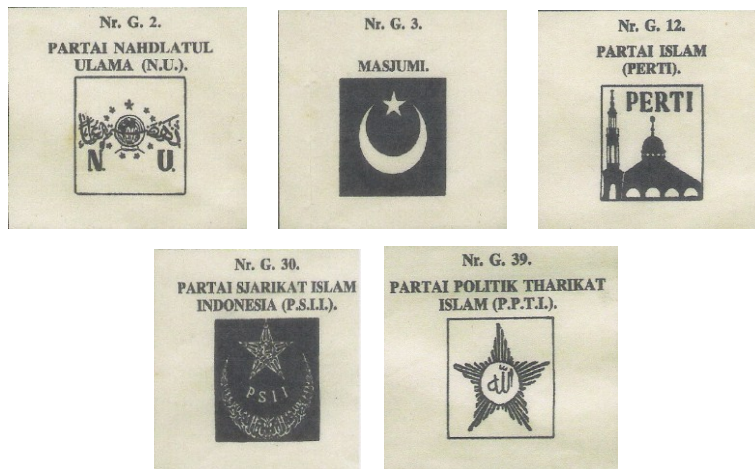
Visual secara sederhana dapat dimaknai sebagai "*everything that can be seen*" [3]. Selanjutnya, lambang dapat dimaknai sebagai sesuatu hal atau keadaan yang merupakan pengantara pemahaman terhadap obyek atau sesuatu hal atau keadaan yang memimpin pemahaman si subyek kepada obyek. Lambang tegasnya merupakan sesuatu benda, keadaan atau hal yang mempunyai arti yang lebih luas dan memerlukan pemahaman subyek akan arti yang terkandung di dalam lambang-lambang tersebut [4].²

² Lambang atau simbol berbeda dengan isyarat dan tanda. Isyarat ialah sesuatu hal atau keadaan yang diberitahukan oleh si subyek kepada obyek. Dengan demikian, subyek selalu berbuat sesuatu untuk memberitahukan kepada obyek agar obyek mengetahuinya pada saat itu juga. Isyarat tidak dapat ditanggihkan pemakaiannya, ia hanya berlaku pada saat dikeluarkan atau dilakukan oleh subyek. Sementara itu tanda merupakan sesuatu hal atau keadaan yang menerangkan atau memberitahukan obyek kepada subyek. Tanda selalu menunjuk kepada sesuatu yang nyata, yaitu benda, kejadian atau tindakan. Sebagai contoh dari sebuah tanda, adalah tanda-tanda pangkat dan jabatan, tugu-tugu kilometer, dan tanda baca. [4]

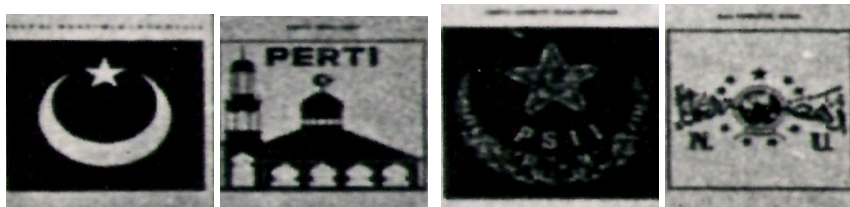
Dari pengertian sederhana tentang visual dan lambang tersebut maka visualisasi lambang partai politik dapat dimaknai sebagai pengungkapan suatu gagasan atau perasaan yang berkaitan dengan keberadaan sebuah partai politik dengan menggunakan bentuk gambar dan tulisan (angka atau kata). Berkaitan dengan ranah visual ini, Feldman [5] mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat elemen visual yang perlu diperhatikan, yakni, garis, bentuk, terang dan gelap, serta warna. Tidak jauh berbeda dengan Feldman, Berger [6] mengatakan ada enam aspek yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menganalisis sebuah wujud visual, yakni, warna, ukuran, ruang lingkup, kontras, bentuk, dan detail. Untuk kepentingan tulisan ini, elemen visual lambang-lambang partai politik yang diamati dibatasi hanya pada bentuk dan warna.

Dalam kaitannya dengan lambang ini pula, penting untuk diketahui berbagai regulasi yang mengatur perlambangan bagi sebuah partai politik. Beberapa regulasi yang mengatur tentang perlambangan di setiap menjelang pemilihan umum, di antaranya adalah, pertama, Undang Undang No. 7 Tahun 1953, tertanggal 4 April 1953. Undang-undang ini mengikat peserta Pemilu 1955. Kedua, Undang-Undang No. 15 Tahun 1969, tertanggal 17 Desember 1969. Regulasi kedua ini mengikat partai-partai politik yang akan turut serta dalam Pemilu 1971. Ketiga, Undang-Undang No. 4 tahun 1975. Undang-Undang No. 4 tahun 1975 ini mengikat partai-partai politik yang akan ikut berpartisipasi dalam Pemilu 1977.

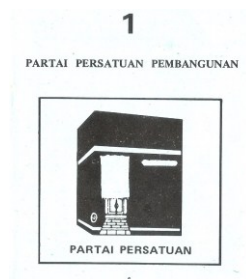
Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004, jumlah partai politik Islam yang menjadi peserta pemilihan umum mengalami perkembangan yang relatif dinamis. Dalam Pemilihan Umum 1955, tercatat ada lima partai politik Islam. Dalam Pemilu 1971, setidaknya terdapat empat partai politik Islam yang turut menjadi peserta pemilihan umum. Selanjutnya, dalam lima kali pemilihan umum yang berlangsung sejak tahun 1977 hingga 1997, hanya ada satu partai politik Islam yang menjadi peserta pemilihan umum, yakni Partai Persatuan Pembangunan. Sepanjang keikutsertaannya dalam lima kali pemilihan umum di era orde baru, ada dua lambang yang pernah digunakan PPP. Sementara dalam dua kali pemilihan umum yang berlangsung di era reformasi, partai politik Islam yang menjadi peserta pemilihan umum, masing-masing berjumlah 19 pada Pemilu 1999 dan 7 partai politik Islam dalam Pemilu 2004. Adapun visualisasi lambang-lambang partai politik Islam tersebut adalah, sebagai berikut:



Gambar 1 Visualisasi Lambang-lambang Partai Politik Islam yang Menjadi Peserta Pemilu 1955.



Gambar 2 Visualisasi Lambang-lambang Partai Politik Islam yang Menjadi Peserta Pemilu 1971.



Gambar 3 Visualisasi Lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digunakan dalam Pemilu 1977 dan Pemilu 1982. PPP sekaligus merupakan representasi satu-satunya partai politik Islam dalam Pemilu 1977 dan Pemilu 1982.



Gambar 4 Visualisasi Lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digunakan dalam Pemilu 1987, 1992, dan 1997. PPP sekaligus merupakan representasi satu-satunya partai politik Islam dalam tiga pemilu terakhir di masa pemerintahan Soeharto tersebut.



Gambar 5 Visualisasi Lambang-lambang Partai Politik Islam yang Menjadi Peserta Pemilu 1999.



Gambar 6 Visualisasi Lambang-lambang Partai Politik Islam yang Menjadi Peserta Pemilu 2004.

4 Transformasi Bentuk visual dan Makna Visual

Transformasi visual lambang-lambang partai politik sebagaimana diuraikan di depan, tentu memperlihatkan fenomena-fenomena menarik untuk diamati. Fenomena tersebut tidak hanya berada pada ranah politik tetapi juga berkait erat dengan ranah budaya, khususnya bentuk visual dan makna visual.

Dilihat dari ranah politik, kehadiran lambang-lambang partai politik ternyata tidak bisa dilepaskan dari berbagai peraturan yang membatasinya. Partai-partai politik dalam membuat lambangnya harus benar-benar memperhatikan ketentuan perundang-undangan, karena tidak semua bentuk visual diperkenankan untuk menjadi materi lambang partai politik. Ketentuan perundang-undangan yang melarang penggunaan tanda gambar atau bentuk visual tertentu telah muncul sejak menjelang Pemilu 1955. Larangan penggunaan bentuk visual tertentu ini relatif menjadi semakin ketat di era pemerintahan Soeharto. Sementara itu, seiring dengan diadakannya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi terlarang³, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam perundang-undangan, tetapi era orde baru dapat dikatakan melarang partai-partai politik menggunakan palu dan arit sebagai bentuk-bentuk visual dalam lambangnya.

Keketatan pemerintah Soeharto dalam mengatur lambang-lambang partai politik menjadi semakin terasa lagi saat Pancasila dijadikan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui Undang-Undang No. 3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar. Ketentuan tersebut secara otomatis memberangus kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk visual di luar bentuk visual yang menjadi lambang negara, yakni bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Akibat ketentuan ini pula, sejak keikutsertaannya dalam Pemilu 1987, atau tepatnya sejak Muktamar I yang berlangsung di Jakarta tahun 1984, PPP mengubah lambang partai politiknya dari kabah menjadi bintang [7]. Lambang baru PPP dalam Pemilu 1987 ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 1986 tentang Nama dan Tanda Gambar Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya serta Penentuan Nomornya Masing-masing Yang Digunakan dalam Pemilihan Umum 1987, tertanggal 27 Juni 1986. Pemilihan bintang sebagai bentuk visual pengganti kabah tampak kuat sekali dikarenakan bintang merupakan representasi simbol ketuhanan dan dengan demikian diharapkan akan tetap mampu merepresentasikan ideologi Islam yang digunakan PPP.

Dalam ranah kebudayaan, keberadaan lambang-lambang partai politik secara diakronis memperlihatkan adanya pergerakan yang relatif dinamis berkaitan dengan penggunaan bentuk-bentuk visual. Dalam Pemilu 1955, setidaknya terdapat 3 bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam. Ketiga

³ Penetapan PKI sebagai organisasi terlarang ditetapkan Letnan Jenderal Soeharto, atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPR/ Pemimpin Besar Revolusi, melalui Keputusan Presiden No. 1/3/1966, tertanggal 12 Maret 1966. Dalam butir dua keputusan presiden tersebut secara jelas disebutkan "Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia" (O.G. Roeder [8]).

bentuk visual tersebut adalah bintang, bulan, dan masjid. Di antara ketiga bentuk visual tersebut, bintang merupakan bentuk visual yang paling banyak digunakan partai-partai politik Islam dalam lambangnya. Dari lima partai politik Islam yang menjadi peserta Pemilu 1955, hanya satu partai politik Islam yang tidak menggunakan bintang sebagai bentuk visual lambangnya, yakni Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). PERTI sekaligus pula merupakan satu-satunya partai politik Islam yang menjadikan masjid sebagai bentuk visual utama dalam lambangnya.

Sama halnya dengan Pemilu 1955, dalam Pemilu 1971, juga terdapat tiga bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam dalam lambangnya, yaitu, bintang, bulan, dan mesjid. Dengan demikian, penurunan jumlah partai politik Islam sebagai peserta pemilu dalam Pemilu 1971, dari semula lima partai politik Islam pada Pemilu 1955 menjadi empat partai politik Islam dalam Pemilu 1971, ternyata tidak mengurangi jumlah bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam. Sama halnya pula dengan Pemilu 1955, di antara ketiga bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam dalam lambangnya, bintang tetap menjadi bentuk visual yang paling banyak digunakan oleh partai-partai politik Islam dalam lambangnya. Dari empat partai politik Islam yang menjadi peserta Pemilu 1971, hanya partai politik Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang tidak menggunakan bintang sebagai bentuk visualnya. Partai ini pun menjadi satu-satunya partai yang menjadikan mesjid sebagai bentuk visual utamanya.

Kemiripan jumlah bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam pada Pemilu 1971 dan Pemilu 1955 tidak lain dikarenakan adanya kesamaan penggunaan lambang oleh partai-partai politik Islam yang menjadi peserta pemilihan umum 1955 dan 1971. Dalam Pemilu 1971, setidaknya ada tiga partai politik Islam yang sebelumnya juga turut menjadi peserta dalam Pemilu 1955, yakni Nahdatul Ulama, PERTI, dan PSII. Ketiga partai politik ini dalam Pemilu 1971 menggunakan lambang yang sama dengan lambang yang digunakan dalam Pemilu 1955. Sementara Parmusi, yang merupakan pendatang baru, menggunakan lambang yang pernah digunakan Masyumi dalam Pemilu 1955. Dengan demikian, secara implisit tampak bahwa melalui pilihan lambangnya, ada upaya dari Parmusi untuk menegaskan keberadaannya sebagai kelanjutan dari Masyumi, sekaligus tentunya untuk menarik simpati dari para bekas simpatisan Masyumi.

Berbeda dengan Pemilu 1955 dan Pemilu 1971, dalam Pemilu 1977, dapat dikatakan terjadi penurunan jumlah bentuk visual yang digunakan oleh partai politik Islam dalam lambangnya. Lebih dari itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang menjadi satu-satunya partai politik yang direpresentasikan sebagai

partai politik Islam, sama sekali tidak menggunakan satu pun bentuk visual yang pernah digunakan partai-partai politik Islam dalam dua pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 1955 dan Pemilu 1971. Dalam Pemilu 1977 dan juga Pemilu 1982, PPP menggunakan kabah sebagai bentuk visual utamanya dalam lambangnya. Penggunaan kabah sebagai bentuk visual utama dalam lambang partai politik Islam sekaligus merupakan fenomena baru dalam perlambangan partai-partai politik Islam. Bintang yang sebelumnya merupakan bentuk visual yang paling banyak digunakan partai-partai politik Islam, sama sekali tidak digunakan oleh PPP.

Keberadaan kabah sebagai satu-satunya bentuk visual yang digunakan oleh partai politik Islam, ternyata tidaklah berusia panjang. Pemilu 1982 merupakan pemilu terakhir yang menampilkan kabah sebagai satu-satunya bentuk visual dalam lambang partai politik Islam. Sesudah itu, seiring dengan ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985, kabah pun secara tidak langsung berubah menjadi bentuk visual yang terlarang digunakan dalam lambang partai politik. Pada akhirnya, sejak Pemilu 1987 hingga Pemilu 1997, PPP menjadikan bintang sebagai bentuk visual utama dalam lambangnya, sekaligus menggeser posisi kabah.

Saat berlangsungnya Pemilu 1999, bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Dari semula tiga bentuk visual dalam pemilu 1955 dan Pemilu 1977, serta satu bentuk visual dalam Pemilu 1977 hingga 1997, dalam Pemilu 1999, setidaknya terdapat 12 bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam. Peningkatan jumlah bentuk visual ini tentunya memiliki korelasi dengan meningkatnya jumlah partai politik Islam yang menjadi peserta pemilu serta terciptanya atmosfir politik yang memberi ruang luas bagi munculnya bentuk-bentuk visual yang baru.

Di samping bintang, bulan, dan kabah, bentuk visual lain yang digunakan partai-partai politik Islam, antara lain adalah matahari, bola dunia, peta Indonesia, tasbih, sajadah, padi kapas, rencong, dan tali. Namun demikian, sebagaimana halnya dalam Pemilu 1955 dan Pemilu 1971, dalam Pemilu 1999 pun, bentuk visual bintang merupakan bentuk visual yang paling banyak digunakan oleh partai-partai politik Islam. Selanjutnya, berbeda dengan lambang-lambang yang muncul dalam pemilu-pemilu sebelumnya, lambang-lambang partai politik Islam yang muncul dalam Pemilu 1999 juga kaya dengan penggunaan warna. Bila semula hanya warna putih dan hitam, dalam Pemilu 1999 ini, muncul pula warna-warna baru yang digunakan oleh partai-partai politik Islam, seperti warna hijau, kuning, merah, dan biru. Di antara warna-warna baru tersebut, warna hijau merupakan warna yang paling banyak digunakan sebagai warna dasar lambang partai politik Islam.

Ketika berlangsung Pemilu 2004, sejalan pula dengan berkurangnya jumlah partai politik Islam yang menjadi peserta pemilu, bentuk visual yang terdapat dalam lambang-lambang partai politik Islam pun mengalami penurunan secara kuantitatif. Penurunan jumlah partai politik Islam yang menjadi peserta pemilu dari 19 menjadi 7, diikuti pula oleh menurunnya jumlah bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam. Setidaknya ada empat bentuk visual yang tidak lagi digunakan oleh partai-partai politik Islam dalam lambangnya. Ketiga bentuk visual tersebut adalah tasbih, sajadah, kapas, dan rencong.

Di antara bentuk visual yang digunakan oleh partai-partai politik Islam dalam Pemilu 2004, bintang kembali tampil sebagai bentuk visual yang paling banyak digunakan. Bentuk visual bintang digunakan oleh 4 dari 7 partai politik Islam yang menjadi peserta Pemilu 2004; Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Nahdatul Ummah, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bintang Reformasi. Keberadaan bintang sebagai bentuk visual yang paling banyak dipilih oleh partai-partai politik Islam dalam Pemilu 2004 pada dasarnya sama dengan kondisi pada Pemilu 1999, Pemilu 1971, dan Pemilu 1955.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, partai-partai politik Islam yang menjadi peserta pemilu tampak memanfaatkan warna lain, di luar warna hitam dan putih sebagai warna lambangnya. Warna-warna tersebut adalah hijau, kuning, dan merah. Di antara warna-warna tersebut, warna hijau merupakan warna yang paling banyak digunakan sebagai warna dasar.

Dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, seiring dengan perkembangan teknologi pula, pembuatan lambang-lambang partai politik juga terlihat sangat ramah dengan perkembangan teknologi desain. Lambang tidak lagi dibuat secara manual tetapi juga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi desain dalam pembuatan lambang ini menjadikan lambang-lambang partai politik Islam tampil lebih menarik, lebih berwarna, lebih variatif, dan lebih dinamis.

Di samping keberagaman elemen visual berupa bentuk dan warna, lambang-lambang partai politik pun memperlihatkan perkembangan makna visual. Agar dapat terlihat dengan baik perkembangan makna visual ini, maka perlu dipilih bentuk visual yang secara diakronis selalu muncul dari Pemilu ke Pemilu dan sekaligus banyak digunakan oleh partai-partai politik Islam. Dari sekian banyak bentuk visual yang digunakan partai-partai politik Islam sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004, bintang merupakan bentuk visual yang selalu digunakan oleh partai-partai politik Islam di hampir semua pemilu, terkecuali Pemilu 1977 dan Pemilu 1982.

Transformasi makna visual bintang tampak secara diakronis maupun secara sinkronis. Secara diakronis, tampak dari pemaknaan bintang oleh partai-partai politik Islam sejak Pemilu 1987 hingga Pemilu 2004. Bintang yang muncul sebagai bentuk visual lambang Partai Persatuan Pembangunan sejak Pemilu 1987 hingga Pemilu 1997 secara konsisten dimaknai sebagai lambang sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, saat bintang digunakan sebagai bentuk visual lambang-lambang partai politik dalam Pemilu 1999 tampak terjadi perluasan pemaknaan terhadap bentuk visual bintang. Dalam Pemilu 1999 setidaknya terdapat 13 partai politik Islam yang menggunakan bintang sebagai bentuk visual dalam lambangnya. Dari ketiga belas partai tersebut, ada tiga partai politik yang memaknai bintang sebagai representasi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga partai politik Islam tersebut adalah, Partai Persatuan, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, dan Partai Umat Muslimin Indonesia. Ketiga partai politik tersebut hanya menggunakan satu bintang dalam lambangnya. Realitas ini memperlihatkan adanya kesamaan pemaknaan bintang sebagaimana yang dimaknai dalam Pemilu 1987 hingga Pemilu 1997.

Sembilan partai politik Islam lainnya memaknai bintang secara sangat beragam. Demikian pula halnya dalam pemanfaatan jumlah bintang. Dari sembilan partai politik tersebut, enam partai politik menggunakan satu bintang dalam lambangnya, satu partai politik memanfaatkan enam bintang dalam lambangnya, dan tiga partai politik memanfaatkan sembilan bintang.

Enam partai politik yang menggunakan satu bintang dalam lambangnya adalah, Partai Masyumi Baru, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Abul Yatama, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Politik Islam Indonesia "Masyumi", dan Partai Bulan Bintang. Dari keenam partai politik tersebut, terdapat satu partai politik yang tidak memberikan makna apapun terhadap bentuk visual bintang yang digunakannya, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia – 1905.

Lima partai politik lainnya memaknai bentuk visual bintang secara sangat beragam. Ada yang memaknai bintang melalui segilima yang dimiliki bentuk visual bintang yang digunakannya. Oleh Partai Masyumi Baru bintang bersegi lima dimaknai sebagai mempertahankan Pancasila dan UUD 1945, terutama Pancasila sebagai ideologi negara. Sementara oleh Partai Syarikat Islam Indonesia, bintang bersegi lima dimaknai sebagai lima rukun Islam.

Tiga partai politik Islam lainnya memaknai bentuk visual bintang dengan tidak melihat bentuk segilima yang dimiliki bentuk visual bintang yang digunakannya tetapi melihat bentuk visual bintang secara utuh. Tetapi, hal itupun tetap melahirkan makna yang beragam. Partai Abul Yatama memaknainya sebagai dasar terwujudnya harapan dan cita-cita. Partai Politik Islam Indonesia

“Masyumi” memaknai bentuk visual bintang sebagai satu kesatuan dengan bentuk visual bulan dan dimaknai sebagai lambang umat Islam sedunia. Partai Bulan Bintang memaknai sebagai pemberi arah perjalanan tatkala gelap.

Tiga partai politik yang menggunakan sembilan bintang dalam lambangnya juga menampilkan keberagaman makna. Partai Kebangkitan Umat memaknai kesembilan bintang sebagai representasi walisongo, sementara bila diuraikan kesembilan bintang tersebut; satu bintang yang terletak di atas menggambarkan Nabi Muhammad SAW, empat bintang di sebelah kanan menggambarkan khulafat’ur rosyidin, dan empat bintang di sebelah kiri menggambarkan empat madzhab. Partai Nahdlatul Umat memaknai kesembilan bintang sebagai representasi sembilan panutan partai, yang terdiri dari Nabi Muhammad SAW, empat Khulafat’ur Rosyidin dan empat imam madzhab. Partai Kebangkitan Bangsa memaknai kesembilan bintangnya sebagai sembilan idealisme partai yang memuat 9 nilai kebenaran, yaitu, kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.

Pada akhirnya Partai Umat Islam menjadi satu-satunya partai politik Islam yang memanfaatkan enam bintang dalam lambangnya. Keenam bintang tersebut (satu bintang besar dan lima bintang kecil) dimaknai sebagai rukun iman, sementara bila dirinci lebih lanjut, satu bintang besar di dalam dan lima bintang kecil melingkar melambangkan kehendak umat Islam untuk mencapai kejayaan yang transedental dan berperadaban, sementara lima bintang kecil yang menyempurnakan lingkaran bulan sabit melambangkan rukun Islam.

Dari uraian tentang makna visual bintang di atas tampaklah bahwa lambang bintang dimaknai secara sangat beragam. Keberagaman makna tidak hanya terjadi saat jumlah bintang yang digunakan dalam lambang berbeda tetapi juga terjadi saat bintang yang digunakan dalam lambang memiliki jumlah yang sama. Namun demikian, dibalik keberagaman tersebut terdapat pula kesamaan pemaknaan di antara beberapa partai politik Islam terhadap lambang yang dimilikinya.

Keberagaman pemaknaan bentuk visual bintang secara tidak langsung memperlihatkan bahwa bentuk visual bintang tidak memiliki kesatuan makna di antara partai-partai politik Islam. Bintang dapat dimaknai secara bebas tergantung kebutuhan dan kepentingan partai politik tersebut. Partai-partai politik Islam pun tampaknya menghindari adanya kesamaan makna terhadap bentuk visual bintang yang dimilikinya. Kalaupun terjadi kesamaan makna terhadap bentuk visual bintang, hal itu terjadi lebih dikarenakan mengikuti pemaknaan yang telah ada sebelumnya terhadap bintang, sebagai salah satu bentuk visual dalam lambang negara, Garuda Pancasila.

5 Simpulan

Lambang-lambang partai politik di Indonesia memperlihatkan pergerakan yang sangat dinamis. Lambang partai politik secara implisit memperlihatkan tentang sistem politik yang berlaku saat lambang dibuat. Secara keseluruhan di semua sistem politik, keberadaan lambang dibatasi oleh aturan-aturan tentang bentuk visual yang boleh dan tidak boleh digunakan. Namun, dalam masa pemerintahan Soeharto, peraturan yang mengatur lambang-lambang partai politik relatif lebih ketat sehingga tampak membatasi kreativitas partai politik dalam membuat lambangnya. Era Soeharto tidak saja mengatur lebih ketat tentang bentuk-bentuk visual yang tidak boleh digunakan tetapi juga mengatur tentang warna yang boleh digunakan partai politik dalam lambangnya. Era Soeharto hanya mengizinkan penggunaan warna hitam dan putih.

Lambang partai politik juga memperlihatkan jiwa zaman saat lambang-lambang partai politik dibuat. Jiwa zaman ini tampak pula dalam penggunaan unsur-bentuk visual dalam lambang partai politik. Jiwa zaman melahirkan bentuk visual yang boleh dan tidak boleh digunakan.

Lambang partai politik memperlihatkan pula pergerakan dinamis tentang pemanfaatan bentuk-bentuk visual. Bentuk-bentuk visual yang digunakan tampak mengalami pasang surut secara kuantitatif. Sementara secara kualitatif tampilan unsur-bentuk visual juga tampak bergerak secara dinamis. Hal ini sejalan pula dengan perkembangan teknologi desain.

Sejalan dengan dinamika yang terjadi pada bentuk visual, lambang-lambang partai politik juga memperlihatkan pergerakan yang dinamis tentang makna visual. Makna visual untuk bentuk visual yang sama tidaklah selalu sama. Dengan demikian, pemaknaan terhadap bentuk visual relatif sangat kontekstual dan tergantung kebutuhan partai politik.

Pengamatan secara diakronis terhadap lambang-lambang partai politik memperlihatkan pula tentang pentingnya keberadaan elemen visual berupa bentuk dan warna bagi partai politik. Lambang tidak sekedar dilihat sebagai penanda identitas tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya meraih dukungan dari para konstituen.

Daftar Pustaka

- [1] Daniel Dhakidae. 1985. *Analisa Kekuatan politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, p. 202.
- [2] Garraghan, Gilbert J.. 1957. *A Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press.

- [3] Barnard, Malcolm. 1998. *Art, Design and Visual Culture: An Introduction*, St. Martin's Press, Inc., New York.
- [4] Herusatoto, Budiono. 2008. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 18-19.
- [5] Feldman, Edmund Burke. 1967. *Art As Image And Idea*, Prentice Hall, Inc., New Jersey.
- [6] Berger, Arthur Asa. 2005. *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- [7] Mandan, Arief Mudatsir. 2009. *Krisis Ideologi: Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasus Penerapan Ideologi Islam PPP*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta.
- [8] O.G. Roeder. 1971. *Who's Who In Indonesia*, Biographies of Prominent Indonesian Personalities in All Fields, Jakarta, Gunung Agung, pp. 394-395.